



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI, BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK,
DJSN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang	: 2013-2014
Masa Persidangan	: II
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 25 November 2013
Pukul	: 10.00 WIB – selesai
Acara	: 1. Persiapan Pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja agar siap berkompetensi dengan pekerja di luar negeri dan pekerja asing di dalam negeri; 2. Membahas Road Map Pemerintah dalam mengatasi dan menyelesaikan permasalahan TKI di luar negeri disertai data-data kasus yang telah diselesaikan; 3. Membahas program kerja Pemerintah dalam mempersiapkan lapangan kerja bagi calon TKI atau TKI purna, sehingga tidak selalu berpikir untuk bekerja di luar negeri; 4. Membicarakan progres progam-program prioritas nasional, terutama program perlindungan TKI luar negeri Tahun 2013; 5. Penjelasan progres pelaksanaan rekomendasi Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR RI.
Ketua Rapat	: dr. Ribka Tjiptaning/ Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Tri Udiartiningrum/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I Gedung Nusantara I Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Hadir : A. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI beserta jajaran
B. Anggota Komisi IX DPR RI
orang dari 49 orang Anggota
Komisi IX DPR RI

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dibuka pukul 10.40 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI meminta Menakertrans RI untuk menyusun program kerja yang selaras dengan sistem kerja yang berlaku di Kementerian, sehingga penyerapan anggaran dapat maksimal.
2. Komisi IX DPR RI mendorong Menakertrans RI agar menciptakan lapangan kerja di dalam negeri dengan meningkatkan program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), sehingga dapat mengurangi jumlah tenaga kerja yang bekerja di luar negeri.
3. Komisi IX DPR RI meminta Menakertrans RI untuk segera menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang dapat menjawab permasalahan TKI khususnya TKI *overstayer* yang setiap tahun selalu berulang, dalam konteks pemulangan dan perlindungan.
4. Komisi IX DPR RI meminta Menakertrans RI untuk mengevaluasi kembali keberadaan 10 PPTKIS yang ditunjuk sebagai Perwalu di Malaysia berdasarkan Surat Edaran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. B. 186/MEN/PPTK-PTKLN/IX/2013 tanggal 24 September 2013.
5. Komisi IX DPR RI meminta Menakertrans RI untuk menyusun kebijakan atau langkah-langkah kongkrit dan komprehensif terkait dengan pelaksanaan hasil rekomendasi Panja Outsourcing BUMN sehingga tuntutan para pekerja outsourcing dapat segera direalisasikan.
6. Komisi IX DPR RI akan mempertegas pembentukan satgas dalam mengawal pelaksanaan rekomendasi Panja Outsourcing BUMN.

Rapat diakhiri pukul 13.40 WIB

KETUA RAPAT,



dr. RIBKA TJIPTANING